

**EFEKTIVITAS PERENCANAAN PROGRAM
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA
ANGKUTAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN KOTA
MEDAN METROPOLITAN**

SKRIPSI

Oleh :

IRGI AHMAD FAHREZI
NPM : 1703100014

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kosentrasi Pembangunan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
2021**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

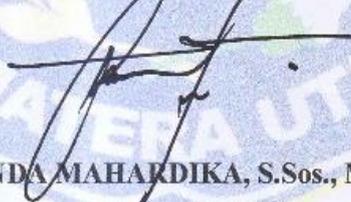
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **IRGI AHMAD FAHREZI**
NPM : 1703100014
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Efektivitas Perencanaan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum Dalam Mewujudkan Kota Medan Metropolitan

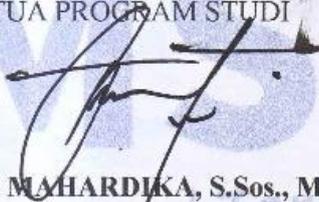
Medan, 02 Juli 2021

PEMBIMBING


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **IRGI AHMAD FAHREZI**
NPM : 1703100014
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Jum'at, 09 Juli 2021
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd** (.....)

PENGUJI II : **Drs. H. SYAFRIZAL, M. Si., Ph.D** (.....)

PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Drs. ZULFAHMI M.LKOM



PERNYATAAN



Dengan ini saya, IRGI AHMAD FAHREZI, NPM 1703100014, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 02 Juli 2021

Yang menyatakan



IRGI AHMAD FAHREZI

1703100014

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PERENCANAAN PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN KOTA MEDAN METROPOLITAN

IRGI AHMAD FAHREZI
NPM : 1703100014

Angkutan Umum merupakan sarana kendaraan atau moda angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Untuk menunjang dari sarana angkutan umum ini maka diperlukan sarana prasarana yang baik juga dengan menyediakan halte untuk tempat pemberhentian orang, ruas jalan yang baik, adanya rambu-rambu angkutan orang atau barang, dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas perencanaan program pengadaan sarana prasarana angkutan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektivitas perencanaan sarana prasarana angkutan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa program pengadaan sarana prasarana angkutan umum masih belum berjalan dengan efektif, karena masih terdapat permasalahan yang terjadi diantaranya masih terdapat ruas jalan yang rusak, masih terdapat halte yang rusak, armada-armada angkutan yang sudah tidak layak beroperasi, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan proses perencanaannya kurang efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Perencanaan, Sarana dan Prasarana, Angkutan Umum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat islam, nikmat waktu, dan nikmat-nikmat yang lainnya kepada penulis dan kita semua. Karena hanya atas karunia-Nyalah skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat sekarang ini. Salah satu dari sekian banyak nikmat penulis mampu menyelesaikan tugas akhir kuliah yaitu skripsi, yang berjudul **“Efektivitas Perencanaan Program Pengadaan Sarana Dan Prasarana Angkutan Umum Dalam Mewujudkan Kota Medan Metropolitan”** ini guna untuk melengkapi tugas akhir serta dimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata-1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan support, dan arahan kepada penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan skripsi ini, diantaranya;

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tersayang Samsul Rizal Guci dan Ibunda tercinta Nurhayati Piliang, dan tak lupa

pula kepada saudara-saudara penulis abang Suhendri Piliang serta kakak Feni Artika Sari Piliang yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

2. Bapak Dr. Agussani.,M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh., S.sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah S.IP., M, Pd selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.sos., MSP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu.
7. Seluruh pegawai biro Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.
8. Terimakasih kepada teman-teman terkhususnya Stambuk 17 PK IMM FISIP UMSU Immawan/Immawati yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Terimakasih kepada orang-orang terdekat yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan sekaligus orang-orang yang selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pendidikan *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2021

Penulis

Irgi Ahmad Fahrezi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penelitian	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1 Efektivitas	9
2.2 Perencanaan	16
2.3 Program	24
2.4 Pengadaan	25
2.5 Sarana dan Prasarana.....	27
2.6 Angkutan Umum.....	28
2.7 Medan Metropolitan	29

BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Kerangka Konsep	32
3.3 Definisi Konsep.....	33
3.4 Kategorisasi Penelitian	34
3.5 Informan atau Narasumber	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7 Teknik Analisis Data	37
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian	38
3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan.....	38
3.9.2 Visi,Misi, dan Tujuan Dinas Perhubungan Kota Medan	38
3.9.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Hasil Penelitian	44
4.2 Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP	70
5.1 Simpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	33
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup**
- Lampiran II : Daftar Pedoman Wawancara**
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Judul Skripsi**
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul**
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal**
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Proposal**
- Lampiran VII : SK-5 Berita Bimbingan Acara Skripsi**
- Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Mahasiswa**
- Lampiran IX : Surat Keterangan Selesai Riset Mahasiswa**
- Lampiran X : SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Medan merupakan salah satu kota terpadat urutan ke-3 di Indonesia yang penduduknya lebih dari 2,3 juta jiwa, dan sekaligus kota terpadat urutan pertama Se-Sumatera Utara. Kepadatan ini terjadi karena aktivitas masyarakat Kota Medan yang sangat tinggi dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lain-lain.

Kota Medan juga merupakan salah satu kota yang sudah berkembang menjadi Kota Metropolitan karena di lihat dalam aspek kepadatan penduduk, mobilitas masyarakat, perdagangan, industri, perbankan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk menunjang semua kegiatan masyarakat salah satunya adalah pemerintah menyediakan sarana dan prasarana angkutan umum yang memadai.

Kota Medan Metropolitan sebenarnya telah termasuk di dalam bagian dari visi-misi Kota Medan pada tahun 2011-2015, yang dimana visi misi tersebut lebih menekankan pembangunan pada bidang sosial, ekonomi, teknologi, dan industri, termasuk di dalamnya pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum dalam menunjang pembangunan Kota Medan.

Perencanaan yang baik dan terstruktur sangat diperlukan sebelum melakukan proses pembuatan program sarana prasarana angkutan umum, karena perencanaan merupakan suatu langkah yang sistematis dalam suatu proses

pelaksanaan program. Perencanaan sarana prasarana angkutan umum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas dan menjadi sasaran perencanaan pembangunan yang hendak dibikin sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kota Medan.

Sarana Angkutan Umum merupakan sarana pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, saat ini aktivitas kehidupan manusia telah mencapai taraf kemajuan semakin kompleks dan beragam. Prasarana angkutan umum mempunyai 2 peran utama, yaitu sebagai alat bantu untuk pembangunan di daerah perkotaan dan sebagai alat bantu untuk mengarahkan perkotaan dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di daerah tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek disebutkan salah satunya adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.

Salah satu pendukung terwujudnya kota medan metropolitan dan pelayanan angkutan umum yang baik, maka di butuhkan sebuah sarana dan prasarana yang baik pula, seperti halte, terminal, jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain yang dimana langsung di naungi oleh dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan.

Angkutan Umum adalah sarana kendaraan atau moda angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan dipungut bayaran. Angkutan umum sendiri terbagi atas 2 yaitu angkutan orang dan angkutan barang. Contoh dari angkutan orang adalah bus, minibus, angkot dan lain-lain, sedangkan contoh dari angkutan barang adalah truk logistik dan kereta api logistik.

Dalam perencanaan pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum pasti ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, seperti penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang belum dijalankan dan ketidaksesuaian SOP dengan keadaan dilapangan, serta permasalahan yang lainnya.

Sarana dan prasarana angkutan umum (angkutan orang) di kota medan telah banyak yang rusak dan terbengkalai begitu saja, seperti halnya halte yang ada di jalan veteran (sekitar pasar bambu), yang kondisinya bukan lagi sebagai halte melainkan sudah berubah menjadi tempat berjualan. Berbeda juga dengan halte yang ada di jalan sutomo yang keberadaannya nyaris tidak terlihat lagi, sehingga membuat supir angkutan umum baik itu bus besar, atau angkot yang sering kali sesuka hati menurunkan penumpang sehingga menimbulkan kemacetan di jalan raya, karena akibat halte yang sudah disediakan oleh pemerintah telah rusak.

Pemasalahan lain adalah kondisi jalan di Kota Medan sebagian telah rusak, sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2019 yang lalu, menyebutkan bahwa dari 3.017 km panjang jalan di kota medan, 15% diantaranya dalam kondisi rusak, sehingga dari jalan yang rusak tersebut banyak

kecelakaan yang terjadi, sehingga masyarakat kota medan mengeluhkan hal tersebut.

Selanjutnya, permasalahan yang lain adalah permasalahan terminal angkutan umum, yang dimana pemerintah sudah menyiapkan terminal guna untuk mengatur keberangkatan, serta tempat menunggu penumpang. Permasalahan yang terjadi disini adalah munculnya terminal-terminal liar yang mengakibatkan pendapatan asli daerah kota medan ikut menurun serta menimbulkan kemacetan yang parah di jam kerja dan jam pulang kerja, karena sebab adanya terminal liar, salah satu contohnya adalah terminal liar yang berada di bawah jalan layang amplas, terminal liar yang berada di simpang carrefour, dan terminal liar lainnya. Itu semua terjadi karena supir-supir angkutan umum mengejar setoran, sehingga di jalanpun ugat-ugalan dan meresahkan pengguna jalan lainnya.

Permasalahan yang tidak kalah penting adalah minat masyarakat Kota Medan dalam menggunakan jasa angkutan umum bisa terbilang masih kurang karena dilihat dari segi jumlah penduduk Kota Medan yang sangat besar serta masyarakat Kota Medan masih nyaman menggunakan kendaraan pribadi untuk berpergian, dan angka kendaraan pribadi masyarakat Kota Medan tergolong besar.

Dari peristiwa kejadian yang sudah disebutkan penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan masih belum terlaksana dengan baik dan belum efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada. Seharusnya perencanaan dibuat sebagai pedoman pembangunan Kota Medan agar tidak lari dari tujuan yang di inginkan.

Menurut Handoko (2003:78), perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus di implementasikan setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna (perencanaan kembali), kadang-kadang menjadi faktor kunci pencapaian sukses akhir.

Permasalahan yang terjadi dari perencanaan yang telah dibuat oleh Dinas Perhubungan menurut penulis adalah ada pada bagian pengawasan. Karena dalam prinsip manajemen disebutkan salah satu unsur terpenting setelah menerapkan suatu perencanaan adalah adanya controlling (pengawasan). Pengawasan sendiri berfungsi untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang telah direncanakan berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Pemerintah seharusnya lebih peka terhadap kondisi yang terjadi dilapangan dan meningkatkan controlling (pengawasan) terhadap sarana prasarana angkutan umum serta memberikan sanksi terhadap masyarakat apabila melakukan kerusakan terhadap sarana prasarana yang ada, sekaligus melakukan peremajaan terhadap sarana prasarana ataupun membuat kamera CCTV di kawasan yang kira-kira tempat permasalahan yang terjadi dan sebagai pengawasan jarak jauh yang efektif. Tetapi hal tersebut bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah saja melainkan juga tugas dari masyarakat setempat untuk saling menjaga fasilitas sarana dan prasarana angkutan umum yang sudah di siapkan oleh pemerintah.

Dengan sudah hadirnya angkutan umum khususnya angkutan orang seperti Trans Mebidang dan Trans Metro Deli, pemerintah mengharapkan bahwa ke dua

bus tersebut bisa mendukung mobilitas warganya serta minat masyarakat untuk menaikki bus meningkat, sehingga terjadilah berkurangnya kemacetan di kota medan. Tetapi upaya itu haruslah ada sosialisasi yang baik serta aktif kepada masyarakat dan juga tarif untuk menaikki ke dua bus tersebut haruslah murah bahkan gratis agar minat masyarakat kota medan menaikki bus meningkat.

Kondisi kota medan yang sudah menjadi kota metropolitan, seharusnya memaksimal pembangunan angkutan umum, karena sektor tersebut adalah sektor terpenting dalam suatu pembangunan daerah kota medan. Terakhir, harus ada kebijakan pemerintah untuk melakukan peremajaan ataupun perawatan terhadap sarana prasarana yang sudah terbengkalai agar berfungsi kembali sebagaimana mestinya, sehingga kelancaran dalam proses perencanaan pembangunan di kota medan bisa berjalan dengan baik dan permasalahan yang terjadi bisa diatasi sesuai dengan kebijakan yang ada.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PERENCANAAN PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN KOTA MEDAN METROPOLITAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah di jelaskan di latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Perencanaan Program Pengadaaan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum dalam Mewujudkan Kota Medan Metropolitan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Perencanaan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum dalam Mewujudkan Kota Medan Metropolitan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta dapat menambah wawasan bagi pembacanya dan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi publik.
2. Secara Teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis dan nantinya dapat mengimplementasikan teori-teori yang sudah diperoleh dalam proses perkuliahan
3. Secara Praktis, dapat menjadi masukan bagi pemerintah atau lembaga bersangkutan, serta menjadi acuan untuk melaksanakan program-program yang akan dibikin kedepannya

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian efektivitas, pengertian perencanaan, pengertian program, pengertian pengadaan, pengertian sarana dan prasarana, dan pengertian kota metropolitan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informen/narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian dan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yaitu bab yang menguraikan mengenai hasil penelitian dilapangan dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Yaitu bab yang mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu kosa kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, ditaati, mengesankan, mujarab, dan mujur. Dari arti di atas maka kata yang paling tepat untuk memahami efektivitas adalah sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah digunakan.

Menurut Mathis dan Jackson (2001:106), efektivitas di definisikan sebagai merancang dan mengimplementasi sekelompok kebijakan dan praktik dan menjamin kesuksesan bahwa sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, efektivitas memiliki empat sifat utama bagi organisasi, antara lain; (a) berorientasi kepada kondisi ekonomi secara menyeluruh dan bersifat umum untuk daerah tertentu; (b) menjamin terhadap

perkembangan industry dan pertumbuhan sehingga dapat melahirkan suatu pola tertentu dalam kenyataan; (c) menentukan tindakan tertentu bagi pemerintah dalam menjalankan program; (d) mengikutsertakan masyarakat sehingga masyarakat merasa dirinya memiliki kepentingan.

Menurut Pekkei (2016:69) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Pengertian lain dari efektif adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

Faktor penentu efektivitas sebagai berikut;

- a. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan
- b. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik struktural maupun fungsional
- c. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan

- d. Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat
- e. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna mencapai sasaran yang dimaksud

Menurut Siagian (2002:20), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar diterapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa mutu tertentu pada waktunya. Selanjutnya dikemukakan bahwa efektivitas sebagai orientasi kerja menyoroti empat hal yaitu; (a) sumber daya, dana, sarana, dan prasarana, yang digunakan sudah ditentukan dan dibatasi; (b) jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus ditentukan sudah dihasilkan; (c) batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah ditetapkan; (d) tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan.

Menurut Sigit (2003:2) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Gie The Liang (2007:2) efektivitas adalah terjadinya efek atau akibat yang dikendaki. Jadi, perbuatan seseorang efektif adalah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang itu, setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti juga efektif, karena dilihat dari segi usaha yang dikehendaki telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur minimal.

Menurut Tangkilisang (2005:139) efektivitas adalah tingkat sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi (operasi kegiatan, program, atau misi) sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya meliputi ketersediaan pegawai, sarana dan prasarana, serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Untuk mengukur efektivitas suatu organisasi bukanlah suatu hal yang sangat mudah dan sederhana. Keluar (output) yang dihasilkan oleh banyak bersifat keluar (output) tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk diukur, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil(outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pertanyaan saja (judgemen), artinya apabila mutu dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhi beberapa kriteria akhir. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal ini dilakukan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P Siagian (2008:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab

apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan berkerja

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuan

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan, seperti keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, pencapaian tujuan akhir semakin terjamin.

Selanjutnya Menurut Gie (2001:29), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain:

- a. Waktu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama, semakin lama tugas disebabkan itu dikerjakan maka semakin banyak tugas lain yang menyusul dan hal ini akan memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit

- b. Tugas, bawahan harus diberikan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang dilegalisasikan pada mereka
- c. Produktivitas, seorang pegawai mempunyai produktivitas yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas yang baik, demikian pula sebaliknya
- d. Motivasi pimpinan dapat mendorong bawahannya melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitive. Semakin termotivasi pegawai untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan
- e. Evaluasi kerja, pimpinan memberikan dorongan bantuan dalam informasi kepada bawahannya, harus melakukan dengan baik atau tidak
- f. Pengawasan, dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko dalam pelaksanaan tugas
- g. Lingkungan tempat kerja, menyangka tata ruang cahaya alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seorang pegawai dalam berkerja
- h. Perlengkapan dan fasilitas, suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam berkerja seseorang dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan

Terdapat pula indikator efektivitas, diantaranya yaitu:

- a. Kejelasan tujuan program

- b. Kejelasan strategi
- c. Perumusan kebijakan program yang mantap
- d. Penyusunan program yang tepat
- e. Penyediaan sarana dan prasaran
- f. Efektivitas operasional program
- g. Efektivitas fungsional program
- h. Efektivitas tujuan program
- i. Efektivitas sasaran program
- j. Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program
- k. Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program

Berdasarkan hasil dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Jadi, perbuatan seseorang efektif adalah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang itu, setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti juga efektif, karena dilihat dari segi usaha yang dikehendaki telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur minimal.

2.2 Perencanaan

2.2.1 Pengertian Perencanaan

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan atas kegiatan perusahaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan pada periode yang akan datang. Pada umumnya tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal sehingga perlu disusun suatu perencanaan laba agar kemampuan yang

dimiliki perusahaan dapat dikerahkan secara terkoordinasi dan terkendali. Di dalam suatu organisasi, perencanaan merupakan salah satu fungsi pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sebenarnya hanya melaksanakan apa yang telah dibuat dalam perencanaan. Jadi perencanaan merupakan tolak ukur bagi manajemen atas kelancaran dan keberhasilan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan.

Menurut Handoko (2003:78), perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus di implementasikan setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna (perencanaan kembali), kadang-kadang menjadi factor kunci pencapaian sukses akhir. Oleh karena itu perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin.

Menurut Dharma (2003:41) perencanaan pada dasarnya merupakan proses penetapan tujuan dan sasaran serta penetapan cara pencapaian tujuan dan sasaran itu. Perencanaan harus mencakup kegiatan untuk menentukan apa yang akan dicapai (tujuan dan sasaran), mengapa harus dicapai (alasan), bagaimana mencapainya (cara, teknik, metode, atau prosedur), siapa yang akan melakukannya (orang, pembagian kerja), dimana melakukannya (tempat), dan kapan harus tercapainya (waktu). Perencanaan menghasilkan suatu peta yang menunjukkan arah yang perlu ditempuh dan upaya yang perlu dilakukan untuk menempuhnya. Perencanaan juga memungkinkan adanya pengendalian (control)

yang efektif karena yang baik telah mencakup standar yang dapat dijadikan petunjuk untuk menilai kegiatan.

Menurut Yunus (2016:101) Perencanaan strategis adalah serangkaian konsep, prosedur, dan alat yang dirancang untuk membentuk eksekutif, pimpinan dan yang lainnya berfikir, bertindak dan mempelajari secara strategis organisasi dan orang-orang yang terkait didalam organisasi itu.

Menurut Keban (2000:03) Perencanaan strategis memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu organisasi/badan dapat berjalan menuju tujuan, sesuai dengan misi dan visinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungannya.

Menurut Steiner (1997:07) Perencanaan strategis adalah proses pemelihan tujuan-tujuan organisasi penentuan strategis, kebijaksanaan dan program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah di implementasikan.

Menurut Adisasmito (2009:27), perencanaan merupakan salah satu komponen penting karena apabila gagal membuat perencanaan akan mengalami kendala dalam melakukan kegiatan selanjutnya. Fase perencanaan dari siklus perbaikan berkelanjutan membutuhkan perumusan perencanaan untuk memenuhi tujuan-tujuan dan sasaran kebijakan politik. Perencanaan lingkungan seharusnya memasukkan hal-hal sebagai berikut

- a. Identifikasi aspek-aspek lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan
- b. Persyaratan-persyaratan legal
- c. Kebijakan lingkungan dan kriteria kinerja internal
- d. Tujuan dan sasaran lingkungan
- e. Perencanaan dan program manajemen

Adapun tujuan perencanaan menurut Azwar (1998:54) antara lain :

- a. Membantu para pelaksana dalam melaksanakan program dengan perencanaan yang baik maka setiap pelaksana akan memahami rencana tersebut dan akan merangsang para pelaksana untuk dapat melakukan beban tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya
- b. Membantu para pelaksana untuk membuat perencanaan pada masa depan, jadi hasil yang diperoleh dari suatu pekerjaan perencanaan pada saat ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja pada masa depan dan demikian seterusnya
- c. Sebagai upaya pengaturan baik dalam bidang waktu, tenaga pelaksana, sarana, biaya, tujuan, lokasi serta macam organisasi pelaksanaannya. Jadi dengan perencanaan yang baik akan menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi, bentrokan ataupun penghamburan dan penyiayaan dari setiap program kerja ataupun aktivitas yang dilakukan, jadi pemanfaatan dari sumber data dan tata cara yang dipunyai dapat diatur secara lebih efisien dan efektif
- d. Untuk memperoleh dukungan baik berupa dukungan legislatif (melalui peraturan ataupun perundang-undangan), dapat berupa dukungan moril

(persetujuan masyarakat, ataupun dukungan materil dan finansial
(biasanya dari para sponsor)

Menurut Allen (1961:67) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan fungsi perencanaan adalah sebagai berikut :

- a. Meramalkan (forecasting), yaitu pekerjaan yang dilakukan seorang manajer dalam memperkirakan waktu yang akan datang dengan sistematis dan kontinu
- b. Menetapkan tujuan (Establishing Objectives), dimana kegiatan ini harus dapat meramalkan hasil akhir dari suatu tujuan atau sasaran
- c. Mengacarakan (programming), yaitu kegiatan seorang pimpinan dalam menentukan urutan-urutan kegiatan yang diperlukan guna pencapaian maksud dan tujuan serta menyusun prioritas dari kegiatan tersebut
- d. Menyusun tata waktu (scheduling), dalam hal ini seorang pimpinan harus dapat menentukan tata kelola waktu terhadap kegiatan atau urutan kegiatan yang akan dilaksanakan
- e. Menyusun anggaran (budgeting), penyusunan anggaran ini dilakukan dengan mengalokasikan sumber-sumber yang dimiliki serta pemanfaatannya
- f. Mengembangkan prosedur (Developing procedure), dilakukan guna penghematan, efektivitas, keseragaman dalam rangka pencapaian tujuan
- g. Menetapkan dan menafsirkan kebijakan (Establishing & Interpreting policy), seorang pimpinan harus dapat menetapkan dan menafsirkan

kebijakan-kebijakan yang dibuatnya pada para bawahannya sehingga tidak timbul kesalah pahaman

Menurut Herlambang (2013:46), manfaat sebuah perencanaan adalah:

- a. Tujuan yang ingin dicapai
- b. Jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan
- c. Jenis dan jumlah staf yang diinginkan, dan uraian tugasnya
- d. Sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan pengarahan yang diperlukan
- e. Bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan.

Selain memberikan manfaat ada beberapa kelemahan dalam sebuah perencanaan menurut herlambang (2013:46), yaitu:

- a. Perencanaan mempunyai keterbatasan mengukur informasi dan fakta-fakta dimasa yang akan datang dengan tepat
- b. Perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana
- c. Perencanaan mempunyai hambatan psikologo bagi pimpinan dan staf karena harus menunggu dan melihat hasil yang akan dicapai
- d. Perencanaan menghambat timbulnya inisiatif. Gagasan baru untuk mengadakan perubahan harus ditunda sampai tahap perencanaan berikutnya.
- e. Perencanaan juga akan menghambat tindakan baru yang harus diambil oleh staf

Langkah-langkah perencanaan menurut Herlambang (2013:47), perlu dilakukan pada proses penyusunan sebuah perencanaan, yaitu:

- a. Analisa situasi
- b. Mengidentifikasi masalah dan prioritasnya
- c. Menentukan tujuan program
- d. Mengkaji hambatan dan kelemahan program
- e. Menyusun rencana kerja operasional

Perencanaan memiliki tipe-tipe menurut Herlambang (2013:47), tipe-tipe perencanaan akan menentukan isi rencana dan bagaimana perencanaan itu dilakukan meskipun proses perencanaan adalah sama untuk setiap manajer dalam praktek perencanaan dapat mengambil berbagai bentuk tipe yang berbeda, untuk lebih mamahami tipe-tipe perencanaan, maka perhatikan uraian sebagai berikut:

- a. Perbedaan tipe perusahaan mempunyai perbedaan misi, sehingga diperlukan perencanaan yang berbeda
- b. Dalam suatu oraganisasi perusahaan dibutuhkan tiper-tipe perencanaan untuk waktu yang berbeda
- c. Manajer yang berbeda akan mempunyai gaya perencanaan yang berbeda.

Ada dua tipe perencanaan menurut Herlambang (2013:47), sebagai berikut:

- a. Rencana-rencana strategi. Strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan organisasi dalam pencapaian misi. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi, dan memberikan pemanfaatan sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan..

- b. Rencana-rencana operasional, dalam rencana operasional dibagi menjadi dua, yaitu :
 - 1. Rencana sekali pakai adalah serangkaian kegiatan terperinci yang kemungkinan tidak berulang dalam bentuk yang sama di waktu yang akan datang. Rencana tetap yaitu bentuk umum rencana tetap adalah kebijaksanaan, prosedur, dan aturan
 - 2. Rencana ini sekali ditetapkan akan terus diterapkan sampai perlu diubah atau dihapuskan

Menurut Herlambang (2013:51), dalam pembuatan perencanaan sebuah organisasi, ada hambatan yang sering muncul, yaitu:

- a. Penolakan dalam diri perencanaan terhadap penetapan perencanaan yang akan dibuat
- b. Penolakan dari para anggota organisasi untuk menerima perencanaan dan perubahan yang akan ditimbulkan dari sebuah perencanaan

Mengapa terjadi penolakan terhadap perencanaan yang akan dibuat, karena:

- a. Kurang pengetahuan tentang perencanaan organisasi
- b. Kurang pengetahuan tentang perubahan lingkungan
- c. Tidak mampuan melakukan peramalan secara efektif
- d. Kesulitan perencanaan operasi yang tidak berulang
- e. Kesulitan biaya
- f. Takut gagal

- g. Kurang percaya diri
- h. Kesulitan menerima kenyataan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan itu sistematis yang berarti tersusun dan bertahap, bisa diartikan sebagai suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

2.3 Program

2.3.1 Pengertian Program

Program didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

Menurut Jones (1996:295), program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah social yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.

Sedangkan Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008:9) mengemukakan definisi program yaitu sebagai ” segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh ”

Menurut Arikunnto (1998:15) program merupakan kegiatan yang direncanakan, maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan. Dengan demikian maka program itu bertujuan dan keberhasilannya dapat diukur. Memang dapat dikatakan tiap orang yang membuat program kegiatan tentu ingin tahu sejauh mana program tersebut dapat terlaksana. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan cara dan alat tertentu.

Definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu implementasi dari kebijakan yang telah disahkan dan melibatkan sekelompok orang. Program dibuat guna untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan. Sebelum suatu program dilaksanakan, harus diketahui terlebih dahulu mengenai uraian kegiatan yang akan dilakukan. Seperti penyusunan kegiatan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang direncanakan dapat mencapai target yang diharapkan.

2.4 Pengadaan

2.4.1 Pengertian Pengadaan

Istilah pengadaan secara khusus mengacu pada kegiatan penyediaan barang/jasa pada instansi pemerintah, yang pelaksanaannya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Bagi perusahaan, pengadaan barang merupakan kegiatan yang penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa, “Pengadaan Barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah/institusi (K/L/SKPD/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Menurut Indra (2012:263) pengadaan barang dan jasa yakni perolehan barang, jasa dan pekerjaan perusahaan dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi perusahaan.

Menurut Tjandra (2017:110) logistic adalah bagian dari instansi yang tugasnya adalah menyediakan bahan/barang yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional instansi tersebut dalam jumlah, kualitas, dan waktu yang tepat (sesuai kebutuhan) dengan harga serendah mungkin.

Menurut Lukas dan Rumsari (2004:4) pengadaan barang/logistic merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang sesuai dengan

kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa dibawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

2.5 Sarana dan Prasarana

2.5.1 Pengertian Sarana dan Prasarana

KBBI menyatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Menurut Moenir (1992:119) menyatakan bahwa pengertian sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Menurut Bafadal (2003:2) sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Sedangkan prasarana ialah segala sesuatu yang merupakan utama terselenggaranya suatu proses.

2.6 Angkutan Umum

2.6.1 Pengertian Angkutan Umum

Menurut Warpani (1990), Angkutan umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan system sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan dijelaskan angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang dilayani dengan trayek tetap atau teratur dan tidak dalam trayek.

Menurut Warpani (1990), tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak lagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah, dan nyaman. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka lapangan kerja. Ditinjau dengan kaca mata per lalu-lintasan, keberadaan

angkutan umum penumpang mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, hal ini memungkinkan karena angkutan umum penumpang bersifat angkutan massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang. Banyaknya penumpang menyebabkan biaya penumpang dapat ditekan serendah mungkin.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa angkutan umum adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang).

2.7 Medan Metropolitan

2.7.1 Pengertian Medan Metropolitan

Kota metropolitan disebut juga kota raya merupakan suatu daerah perkotaan besar yang dicirikan oleh adanya konsentrasi yang sangat tinggi dalam hal penduduk, dan berbagai kegiatan industry perdagangan, perbankan dan lainnya, hal ini menjadi penyebab semakin berkembangnya daerah terbangun kota yang melampaui batas wilayah administrasi kota, kondisi ini mendorong tingginya harga tanah didaerah kota sebagai akibat adanya kebutuhan atau permintaan lahan yang tidak seimbang dengan ketersediaan lahan.

Definisi Metropolis Menurut Jean Bastie dan Bernard Dezert (1991), (1) tidak selalu ditentukan oleh ukuran demografik (factor kependudukan), tetapi juga

oleh factor yang lebih penting dari ukuran kuantitatif populasinya, (2) dicirikan oleh system infrastruktur komunikasi dan transportasi yang melayani pergerakan communiting, aliran informasi, dan pengambilan keputusan, (3) sebagai alat aktivitas keuangan ditingkat atas, (4) sebagai pusat berkumpulnya perusahaan-perusahaan internasional, (5) sebagai pusat kekuatan politik dan administrasi dari sebuah Negara, (6) sebagai tempat pengembangan dan penggunaan teknologi tinggi dan telekomunikasi canggih, (7) sebagai tempat penting aktivitas-aktivitas budaya dan ilmiah, (8) sebagai tempat tujuan wisata internasional, (9) sebagai tempat fungsional tenaga kerja dan perumahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metropolitan dapat juga didefinisikan sebagai suatu pusat pemukiman besar yang terdiri dari satu kota besar dan beberapa kawasan yang berada disekitarnya dengan satu atau lebih kota besar melayani sebagai titik hubung dengan kota-kota disekitarnya tersebut. Suatu kawasan metropolitan merupakan aglomerasi dari beberapa kawasan pemukiman, tidak harus kawasan permukiman yang bersifat kota, namun secara keseluruhan membentuk suatu kesatuan dalam aktivitas bersifat kota dan bermuara pada pusat (kota besar yang merupakan inti) yang dapat dilihat dari aliran tenaga kerja dan aktivitas komersial.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang ini, berdasarkan fakta-fakta.

Menurut Sugiyono (2010:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lain.

Menurut Moelong (2006:11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.

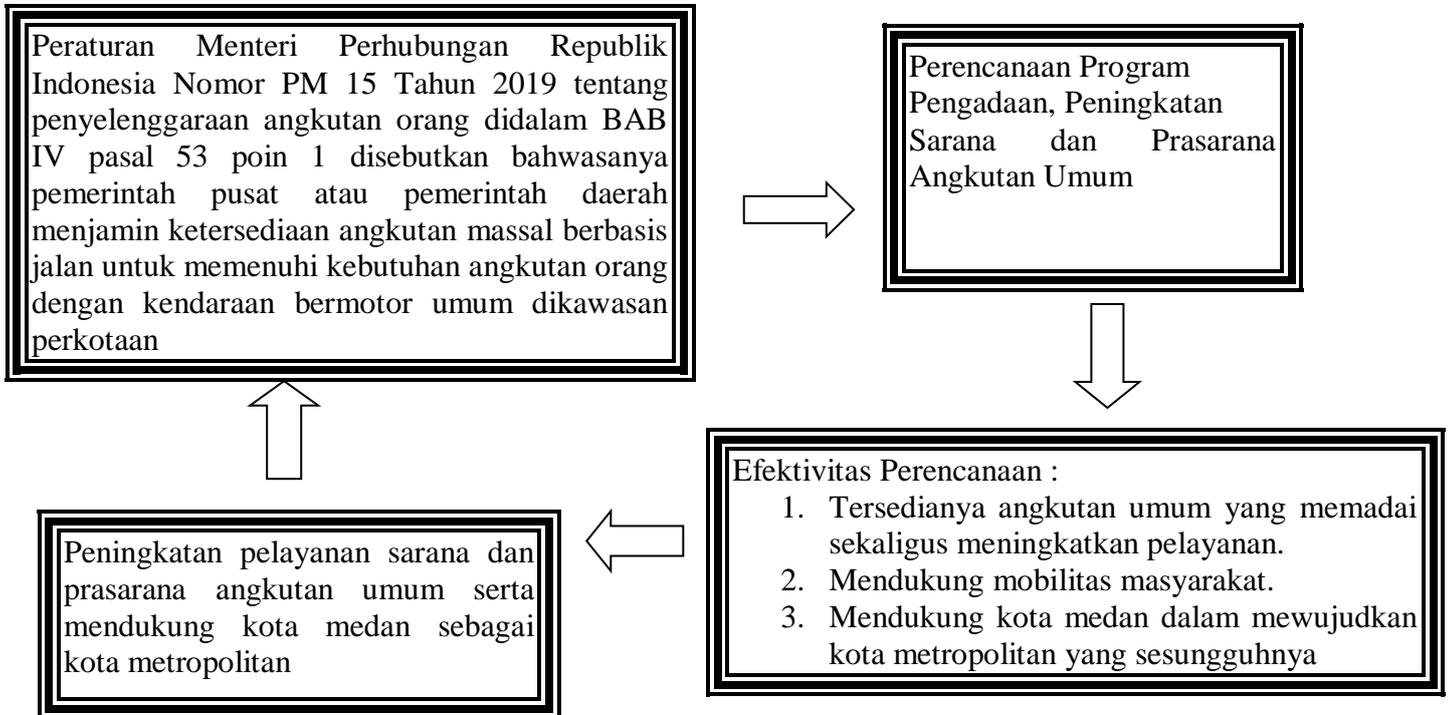
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deksriptif dengan analisis data

kualitatif, yang dimana data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi kata-kata gambar bukan angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya metode kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep pemikiran dalam penelitian ini adalah gambaran pola pikir mengenai Efektivitas Perencanaan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum dalam Mewujudkan Kota Medan Metropolitan.

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Adapun definisi konsep pemikiran yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

- Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan tepat sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

- b. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan.
- c. Program adalah suatu rangkaian rancangan yang tersusun untuk mencapai tujuan/sasaran
- d. Pengadaan adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa dibawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis.
- e. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan.
- f. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan utama terselenggaranya suatu proses
- g. Metropolitan adalah istilah untuk menggambarkan suatu kawasan perkotaan yang relative besar, baik dari ukuran luas wilayah, jumlah penduduk, maupun skala aktivitas ekonomi dan social.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya analisa situasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam permasalahan yang terjadi.

- b. Adanya upaya untuk mengidentifikasi masalah dan prioritasnya yang dilakukan oleh dinas perhubungan.
- c. Adanya langkah-langkah untuk mentukan tujuan dari program yang ingin direncanakan serta mengkaji hambatan dan kelemahan program yang dilakukan oleh dinas perhubungan.
- d. Adanya penyusunan rencana kerja operasional yang dilakukan oleh dinas perhubungan.

3.5 Informan atau Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka peneliti membutuhkan narasumber sebagai orang yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta menjalin kerja sama dengan peneliti.

Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Bapak Burhanuddin P. Harahap, SH, selaku Kepala Bidang Sarana & Prasarana Angkutan
- b. Bapak Ami Kholis Hasibuan, S.SiT. MT, selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi
- c. Ibu Dra. Hj. Sukmawati, selaku Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan & Pemeliharaan Prasarana
- d. Bapak Gumartin Tampubolon, SH, selaku Kepala Seksi Pegoperasian Prasarana

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrument metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab, serta langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

Menurut moleong (2006:186) wawancara percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka.

Menurut Moleong (2006:186) wawancara terbuka adalah wawancara yang para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara itu.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :

1. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan atau dokumentasi yang ada pada lokasi

penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

2. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan untuk meringkas data atau menyeleksi data, di sederhanakan, dan diambil makna utamanya. Data yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga memberikan gambaran tentang efektivitas perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum dalam mewujudkan kota medan metropolitan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan.
- b. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan-catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, keasliannya, dan kecocokkannya yang merupakan validasi.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan di Jln. Pinang Baris, Kp. Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara 20127. Dengan waktu penelitian dimulai pada tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021.

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Medan

Departemen Perhubungan telah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet-Kabinet Republik Indonesia. Rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Medan disusun berawal dari pemikiran strategis tentang nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Kota Medan yang merupakan karakteristik inti dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Medan. Pemerintah Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hubungan daerah. Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan yang efektif, efisien, professional, handal dan berkemampuan.

3.9.2 Visi, Misi dan Tujuan Dinas Perhubungan Kota Medan

- a. Visi

Visi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam upaya menciptakan masyarakat Kota Medan yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan didalam kebhinekaan yang didukung tata pemerintahan yang baik. Handal meliputi : aman, nyaman, tepat, waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. Misi

Misi dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah membangun dan mengembangkan Ekonomi Kerakyakatan yang bertumpu pada pertanian, agroindustri, pariwisata dan sektor-sektor unggulan serta mengembangkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan cara:

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasaran perhubungan (rekondisi/survival)
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang perhubungan dan menegakkan hokum secara konsisten (restrukturisasi dan reposisi)
3. Meningkatkan akseibilitas masyarakat terhadap pelayanan perhubungan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan jasa perhubungan yang handal, berdaya saing dan member nilai tambah

c. Tujuan

Adapun tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Medan ini adalah untuk mewujudkan pelayanan yang baik dibidang perhubungan yang semakin maju agar dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang berlaku.

3.9.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

3.9.3.1 Tugas Pokok

Sesuai dengan pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Walikota Medan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan. Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3.9.3.2 Fungsi

dalam melaksanakan tugas pokok sebagian dimaksud dalam pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh tugas dan fungsinya

3.9.3.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan

Struktur organisasi merupakan pencerminan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang serta posisi individu yang ada dalam perusahaan baik negeri maupun swasta. Struktur organisasi yang baik tentu akan membantu untuk pelaksanaan pekerjaan yang baik juga dalam perusahaan.

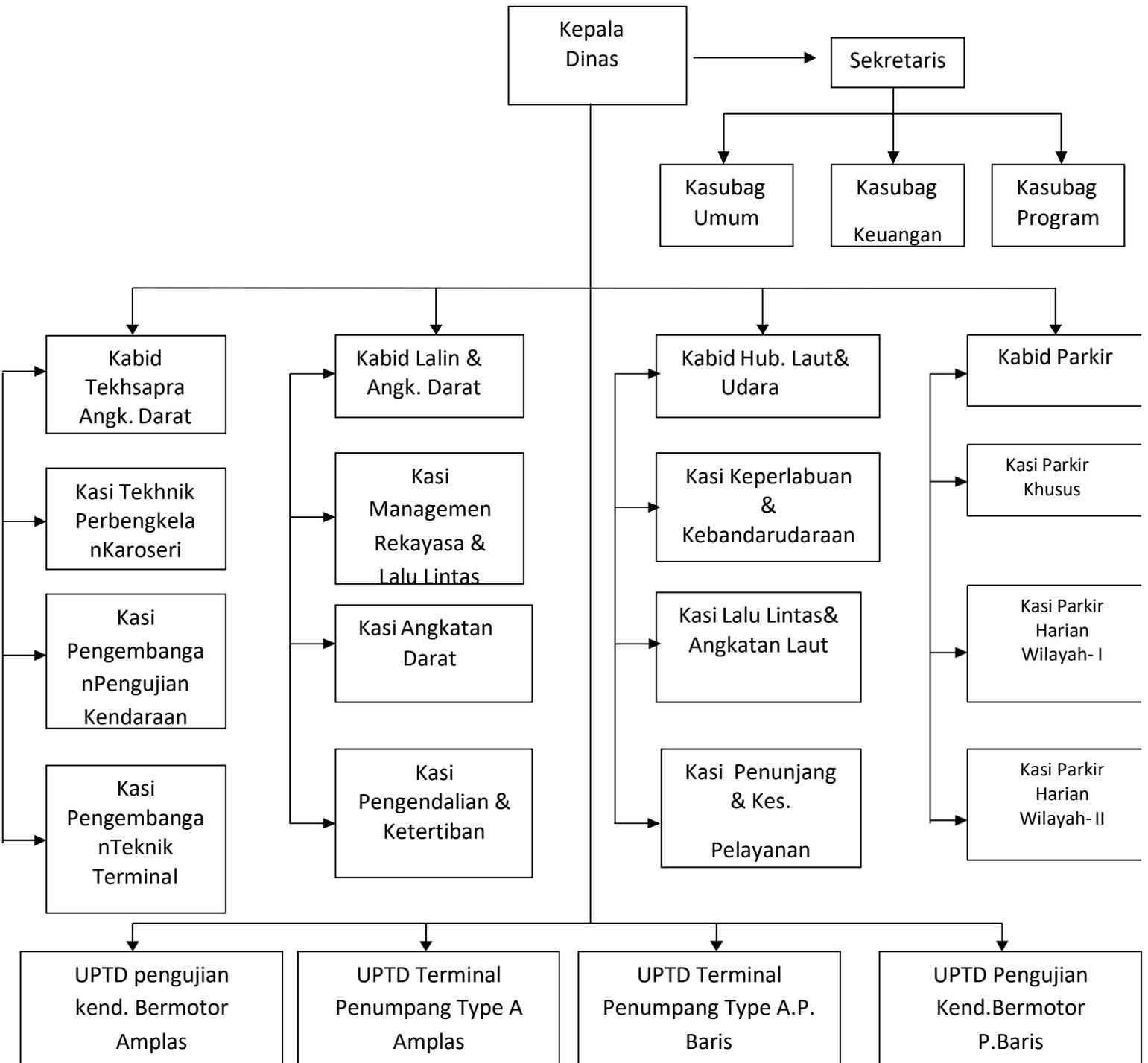
Di dalam tujuan perusahaan/ instansi suatu struktur atau bentuk organisasi yang sempurna yang dapat mengkoordinir aktivitas yang dilaksanakan oleh karyawan tertentu menurut bagiannya masing-masing yang bekerja bersama-sama dibawah pimpinan seorang kepala dinas.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan berdasarkan peraturan Walikota Medan No. 63 Tahun 2017, tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program

- c. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan Darat
 - 1) Seksi Teknis Perbengkelan Karoseri
 - 2) Seksi Pengembangan Teknik Penguji Kendaraan Bermotor
 - 3) Seksi Pengembangan Teknik Terminal
- d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 2) Seksi Angkutan Darat
 - 3) Seksi Pengendalian dan Ketertiban
- e. Bidang Hubungan Laut dan Udara
 - 1) Seksi kepelabuhanan dan Kebandaraudaraan
 - 2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - 3) Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran
- f. Bidang Perparkiran
 - 1) Seksi Parkir Khusus
 - 2) Seksi Parkir Harian Wilayah I
 - 3) Seksi Parkir Harian Wilayah II
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Type A
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Medan



Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Kota

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis membahas serta menyajikan deskripsi data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui metode-metode pengumpulandata dan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu penulis datang langsung ke lokasi tempat penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan permasalahan penelitian dan kemudian mengambil suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Analisis ini terfokus pada perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang dari Dinas Perhubungan Kota Medan.

Wawanncara dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 sampai 10 April 2021 di Dinas Perhubungan Kota Medan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah penelitian serta data-data yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa jawaban dan pernyataan dari para narasumber yang nantinya akan dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh seseorang kepada informan untuk memperoleh suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan secara

terpimpin yaitu pewawancara sebelumnya sudah mempersiapkan draft pertanyaan-pertanyaan secara jelas dan lengkap yang akan ditanyakan kepada informan. Adapun hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut:

4.1.1 Adanya usaha untuk menganalisa situasi keadaan sebelum melakukan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 dengan Bapak Burhanuddin P. Harahap, SH, selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Beliau menyatakan bahwa angkutan umum ini dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu angkutan orang dan angkutan barang. Kondisi sarana prasarana angkutan orang saat ini masih terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti masih ada armada-armada yang tidak layak untuk beroperasi, masih terdapat halte yan rusak, dan sebagian jalan juga telah rusak. Sedangkan kondisi sarana prasarana angkutan barang sudah baik, karena sudah dilengkapi dengan rambu-rambu angkutan barang, sudah disediakan rute-rute khusus angkutan barang, dan jumlah armada angkutan barang sudah banyak. tetapi tidak dipungkiri masih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam angkutan barang ini salah satu contoh masih ada oknum-oknum yang tetap memaksa armada angkutan barang untuk tetap beroperasi walaupun kondisi fisik dari angkutan tersebut tidak memadai untuk beroperasi dan melebihi kapasitas muatan, sehingga akan mengakibatkan kecelakaan.

Sebelum melakukan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum, yang pertama dilakukan oleh Dinas Perhubungan ialah dengan menyusun agenda terlebih dahulu seperti survey kondisi lapangan, kemudian masuk ke tahap proses perencanaan. Proses perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat seperti usulan dari Musrenbang, Renstra serta stakeholder yang terlibat dalam perencanaan tersebut ialah kepala bidang lalu lintas dan angkutan darat, Seksi angkutan, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, dengan Bapak Ami Kholis Hasibuan, S. SiT., MT. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, beliau menyatakan bahwa angkutan umum mempunyai 2 macam tipe yaitu angkutan orang dan angkutan barang, dan dari angkutan orang mempunyai pembagian-pembagian lagi contoh angkutan orang antar kota, angkutan orang antar provinsi, bahkan angkutan orang antar pulau. Kondisi sarana prasarana angkutan orang saat ini masih memiliki permasalahan-permasalahan, diantaranya masih terdapat sebagian halte di kota Medan yang telah rusak, dan sebagian armada angkutan orang yang kondisi fisiknya memerlukan perbaikan dan peremajaan. sedangkan kondisi sarana prasarana angkutan barang sudah baik, karena dilihat dari aspek angkutan barang sudah memadai, dan sudah disediakan rute dan rambu-rambu khusus angkutan barang.

Dalam membuat perencanaan sarana prasarana angkutan umum, baik itu angkutan orang dan angkutan barang. dinas Perhubungan menggunakan metode survey lapangan terlebih dahulu dan menerima laporan dari masyarakat. Kemudian, setelah melakukan hal tersebut maka Dinas Perhubungan melakukan

rapat dan dari hasil rapat yang telah dilakukan maka dibuatlah suatu program yang sesuai dengan visi misi Walikota untuk dijadikan program kerja. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan tersebut adalah kepala bidang lalu lintas dan angkutan, seksi angkutan, disamping itu juga ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan kota Medan yakni situasi lapangan yang tidak menentu.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 01 April 2021, dengan Ibu Dra. Hj.Sukmawati selaku Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, beliau menyatakan bahwa angkutan umum mempunyai 2 macam tipe yaitu angkutan orang dan angkutan barang. Kondisi sarana dan prasarana angkutan orang sudah baik, karena Pemerintah kota Medan sudah menyediakan sarana prasarana seperti bus Trans Metro Deli, Bus Damri, dan telah dibangun kembali halte-halte untuk tempat pemberhentian penumpang. Sedangkan kondisi sarana prasarana angkutan barang saat ini sudah baik, karena Dinas Perhubungan sendiri sudah menyediakan rute dan sekaligus rambu-rambu khusus angkutan barang. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan masih ada permasalahan-permasalahan terjadi baik itu dari angkutan orang atau angkutan barang itu sendiri.

Sebelum melakukan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana hal pertama dilakukan adalah menganalisa situasi keadaan atau melakukan survey lapangan terlebih dahulu, ketika sudah mengetahui permasalahan yang terjadi dari survey yang telah dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan perencanaan program, dan yang terpenting adalah program yang akan di desain harus sesuai

dengan renstra atau sesuai dengan visi misi walikota. Adapun yang terlibat dalam pembuatan program sarana prasarana ini adalah walikota, dinas perhubungan, dan lain-lain sesuai dengan program yang akan dibuat, serta untuk kendala saat ini yang dialami Dinas Perhubungan adalah anggaran yang kurang, karena pada tahun ini sudah terjadi pemotongan anggaran karena efek dari pandemi covid-19.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 03 april 2021, dengan bapak Gumartin Tampubolon, SH, selaku Kepala Seksi Pegoperasian Prasarana, beliau menyatakan bahwa angkutan umum dapat digolongkan menjadi 2 macam tipe, yaitu angkutan orang dan angkutan barang. Kondisi sarana prasarana dari angkutan orang sudah baik, karena pemerintah telah melakukan penambahan angkutan orang, penambahan halte, serta merenovasi terminal-terminal angkutan. Sedangkan kondisi sarana prasarana angkutan barang sudah baik karena pemerintah telah menyiapkan rute serta rambu-rambu khusus angkutan barang.

Dalam membuat perencanaan sarana prasarana angkutan umum yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan survey lapangan terlebih dahulu, baru masuk dalam proses perencanaan dan harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ataupun dari musrenbang. Dan yang terlibat dalam perencanaan program sarana prasarana adalah bidang sarana prasarana, tim pembuat anggaran, dan lain-lain, kalau kendala yang dialami sekarang ini adalah mengenai anggaran yang telah dipotong karena efek dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa angkutan umum yang ada di kota Medan dapat dikategorikan dalam 2 tipe yakni angkutan orang dan angkutan barang. Kondisi angkutan orang dan angkutan barang sudah baik, walaupun begitu masih ada permasalahan-permasalahan yang terjadi diantara lain masih ada armada yang kondisi fisiknya telah rusak sehingga memerlukan perbaikan, adanya angkutan barang yang melebihi muatan, sebagian halte telah rusak, dan sebagainya. Akan tetapi pemerintah sudah mencari solusinya dengan cara menambah angkutan orang dan barang, meningkatkan pengawasan, membangun kembali halte, dan sebagainya

Dalam melakukan perencanaan, pertama yang harus dilakukan adalah melakukan survey yang dimana tujuan survey ini adalah untuk mencari masalah apa yang terjadi, lalu dari hasil survey yang di dapatkan barulah masuk ke tahap perencanaan program sarana prasarana apa yang mau dibikin, yang harus sesuai dengan renstra yang berlaku dan sesuai dengan visi misi walikota.

4.1.2 Adanya upaya untuk mengidentifikasi masalah serta prioritas dalam melakukan suatu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 dengan Bapak Burhanuddin P. Harahap, SH, selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Beliau menyatakan bahwa untuk saat ini permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi atau yang sudah diketahui dalam perencanaan program sarana prasarana angkutan umum yaitu, masih ada

terdapat jalan yang telah rusak, sebagian kondisi angkutan tidak layak untuk beroperasi, dan ada sebagian halte yang telah rusak.

Semua dari permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas merupakan prioritas dari Dinas Perhubungan, tidak ada yang tidak menjadi prioritas karena semua itu untuk mendukung mobilitas masyarakat kota Medan untuk berkegiatan. Salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan bus antar kota yaitu bus Mebidang, dan sudah beroperasinya bus Trans Metro Deli sejak bulan September 2020 yang dimana program tersebut merupakan program dari kementerian perhubungan yang berkerjasama dengan Dinas Perhubungan sedangkan untuk angkutan barang sudah ditambahi armadanya. Dan untuk kendala yang dihadapi saat sekarang ini adalah terjadinya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat karena akibat pandemi Covid-19, sehingga membuat program-program yang harus dijalankan pada tahun ini terkendala.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, dengan Bapak Ami Kholis Hasibuan, S. SiT., MT. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, beliau menyatakan permasalahan yang sudah teridentifikasi dalam program ini adalah adanya sejumlah armada angkutan barang dan angkutan orang yang tidak layak untuk beroperasi, masih terdapat ruas jalan yang rusak, dan adanya sebagian halte yang telah rusak, dan semua permasalahan tersebut merupakan prioritas yang harus dicarikan solusinya agar untuk menjadikan kota Medan menjadi kota yang lebih baik lagi, serta upaya yang telah

dilakukan adalah dengan memperbaiki segala fasilitas sarana dan prasarana angkutan.

Adapun kendala yang dialami Dinas Perhubungan adalah adanya pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah karena akibat terjadinya Covid-19, sehingga mengakibatkan beberapa program terhambat untuk dijalankan, akan tetapi sebelum adanya pandemi Covid-19 ini semua berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 01 April 2021, dengan Ibu Dra. Hj.Sukmawati selaku Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, beliau menyatakan bahwa untuk permasalahan yang sudah diketahui terhadap sarana prasarana angkutan orang saat ini adalah ada beberapa kondisi fisik angkutan orang sebagian sudah ada yang tidak layak pakai lagi untuk beroperasi, ada sebagian jalan yang rusak sehingga menimbulkan kemacetan, serta ada sebagian halte yang telah rusak. Sedangkan permasalahan dari sarana prasarana angkutan barang adalah masih ada oknum-oknum yang mengangkut barang yang melebihi muatan, dan sebagian angkutan barang membutuhkan perbaikan.

Adapun segala permasalahan yang terjadi diatas merupakan prioritas dari Dinas Perhubungan. Maka dari permasalahan tersebut dibuatlah suatu program untuk mengatasi masalah yang terjadi, salah satunya adalah dengan memperbaiki sarana prasarana angkutan yang sudah rusak, menambah jumlah angkutan baik itu angkutan orang dan barang. Dan untuk kendala yang saat ini terjadi dalam

menerapkan program tersebut adalah terjadinya pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah karena pandemi Covid-19.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 03 april 2021, dengan bapak Gumartin Tampubolon, SH, selaku Kepala Seksi Pegoperasian Prasarana, beliau menyatakan sejauh ini permasalahan-permasalahan yang sudah diketahui dari sarana prasarana angkutan orang adalah masih ada beberapa armada-armada bus serta angkutan kota (angkot) yang kondisi fisik angkutannya tidak layak untuk beroperasi, beberapa jalan yang telah rusak, dan tingkat pertumbuhan kendaraan yang semakin tinggi. Dari permasalahan tersebut merupakan prioritas dari Dinas Perhubungan, sehingga dibuat sistem by the service untuk memperbaiki segala sarana prasarana angkutan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa, terdapat beberapa masalah yang telah teridentifikasi seperti angkutan orang dan angkutan barang yang tidak layak untuk beroperasi, adanya sebagian jalan yang rusak, dan adanya sebagian halte yang telah rusak. Dari semua permasalahan tersebut telah menjadi prioritas Dinas Perhubungan untuk dijadikan program dan sekaligus sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi. Untuk kendala yang saat ini terjadi dalam menerapkan program tersebut ialah adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat karena pandemi Covid-19, sehingga untuk menjalankan program tersebut kurang efektif.

4.1.3 Adanya tujuan dari program yang telah direncanakan serta mengkaji hambatan dan kelemahan dari program yang telah direncanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 dengan Bapak Burhanuddin P. Harahap, SH, selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Angkutan. Beliau menyatakan bahwa angkutan umum merupakan suatu moda angkutan, yang dimana mempunyai 2 macam tipe yaitu angkutan orang dan angkutan barang, yang dimana tujuan dari angkutan orang dan barang tersebut untuk meningkatkan pelayanan, contohnya dalam angkutan orang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan angkutan orang dengan menyediakan halte, bus ber AC, jalan yang baik, bus pengangkut orang yang nyaman dan sarana prasarana lainnya, sedangkan tujuan dari angkutan barang ialah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengiriman barang serta meningkatkan keamanan barang saat dikirim. sedangkan untuk kendala-kendala yang dialami adalah ketidak sesuaian Standar Operasional Prosedur dengan keadaan dilapangan, dan untuk program sarana prasarana tersebut tidak ada kelemahan-kelemahan yang terjadi melainkan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, dengan Bapak Ami Kholis Hasibuan, S. SiT., MT. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, beliau menyatakan bahwa angkutan umum mempunyai 2 macam tipe yang tujuannya berbeda beda. Tujuan program dari sarana prasarana angkutan orang secara umum ialah untuk meningkatkan pelayanan angkutan orang seperti tersedianya halte untuk tempat menunggu bus,

tersedianya bus yang nyaman dengan dilengkapi AC, biayanya murah, dan lain sebagainya, sedangkan sarana prasarana angkutan barang tujuannya adalah meningkatkan kualitas pengiriman barang, barang yang dikirim sesuai dengan estimasi waktunya, angkutan yang digunakan untuk mengirim barang memadai, dan lain-lain. Untuk kendala yang dialami dalam program sarana prasarana ini adalah kembali lagi kepada keadaan lapangan yang sering berubah-ubah dan ketidaksesuaian dengan SOP yang ditetapkan. Serta untuk kelemahan dari program ini tidak ada, hanya saja terhalang dengan anggaran yang sudah dipotong oleh pemerintah akibat pandemi Covid-19.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 01 April 2021, dengan Ibu Dra. Hj.Sukmawati selaku Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, beliau menyatakan bahwa angkutan orang bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat agar bisa mendukung mobilitas masyarakat dengan baik. Kedua angkutan barang bertujuan untuk memberikan pelayanan pengiriman barang dengan aman dan cepat. Adapun kendala-kendala yang dialami Dinas Perhubungan saat ini adalah keadaan lapangan yang dapat berubah-ubah dan penerapan SOP yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan, dan untuk kelemahan dari program ini tidak ada, karena program sarana prasarana ini memang sudah dirancang untuk dijadikan sebagai alat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bermobilisasi dan mau tidak mau harus dibuat karena mengingat kota medan menjadi salah satu kota terbesar Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 03 april 2021, dengan bapak Gumartin Tampubolon, SH, selaku Kepala Seksi Pegoperasian Prasarana, beliau menyatakan bahwa ada 2 pembagian angkutan umum yaitu angkutan orang dan angkutan barang, dari angkutan orang tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan menerapkan kondisi bus yang nyaman, murah, dan lain sebagainya, sedangkan angkutan barang tujuannya adalah dengan memberikan pelayanan pengiriman barang yang cepat, aman, dan praktis. Untuk kendala dan kelemahan dari program ini tidak ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa angkutan umum mempunyai 2 pembagian angkutan yaitu angkutan orang dan angkutan barang. Tujuan angkutan orang adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan orang seperti menyediakan halte untuk tempat menunggu penumpang, tersedianya bus yang nyaman serta biaya untuk menaiki bus tersebut murah. Sedangkan tujuan dari angkutan barang adalah untuk memberikan pelayanan pengiriman barang dengan cepat, aman, murah, dan praktis. Dan program sarana prasarana angkutan umum ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas orang maupun barang.

4.1.4 Adanya penyusunan rencana kerja operasional dalam perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 dengan Bapak Burhanuddin P. Harahap, SH, selaku Kepala Bidang

Sarana dan Prasarana Angkutan. Beliau menyatakan bahwa langkah-langkah rencana kerja operasional pengadaan sarana prasana angkutan umum, dapat diambil dari contoh pengadaan bus Trans Metro Deli, yang merupakan program dari Kementerian Perhubungan sedangkan Dinas Perhubungan hanya memberikan partisipasi untuk menjalankan program tersebut, dalam kasus ini kementerian perhubungan mempunyai anggaran untuk menjalankan program tersebut yang bekerjasama dengan pihak ke 3 yaitu PT Medan Bus, yang dimana PT Medan Bus menyiapkan sarananya. Jadi apabila pelayanannya baik maka mereka mendapatkan rewardnya, maka berlakulah panishment and reward. Dan yang terlibat dalam rencana operasional ini adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (BAPPEDA), Dinas Perhubungan, dan apabila sudah rampung maka akan disahkan oleh DPRD, dan pada intinya yang terlibat dalam perencanaan ini adalah tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Dan untuk kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan program ini adalah satlantas, kordinasi dengan pemerintah kota seperti dinas PU, satpol pp, dan Bappeda.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, dengan Bapak Ami Kholis Hasibuan, S. SiT., MT. selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, beliau mengatakan langkah-langkah dari rencana kerja operasional, dapat diambil contoh dari pengadaan bus. Dalam pengadaan bus tersebut kementerian perhubungan mempunyai anggaran dan akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti PT. Medan Bus, Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya.

Dalam penyusunan perencanaan program sarana prasarana angkutan umum, maka dibentuklah sebuah tim yang meliputi Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang diantaranya adalah BAPPEDA, Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, dan lain sebagainya. Apabila sudah mendapatkan keputusan maka masuklah ketahap perencanaan dan tinggal menunggu pengesahan oleh DPRD.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 01 April 2021, dengan Ibu Dra. Hj.Sukmawati selaku Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, beliau menyatakan langkah-langkah dalam merencanakan kerja operasional dalam pengadaan sarana-prasarana angkutan, yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan survey, survey ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan mengetahui kekurangan dari program yang ada sekarang ini, salah satu contohnya adalah kurangnya halte, setelah sudah tau permasalahan yang terjadi barulah masuk ke tahap proses perencanaan dan rencana kerjanya sudah diatur dalam proses perencanaannya atau SOP, setelah itu masuklah dalam anggaran, sekaligus diimplementasikan. Dan yang terlibat dalam perencanaan tersebut adalah kepala bidang sarana prasarana angkutan, seksi pemeliharaan, dan lain-lain sesuai dengan rencana yang dibutuhkan. Dan untuk kerja sama dalam menjalankan program tersebut adalah polisi satlantas, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 03 april 2021, dengan bapak Gumartin Tampubolon, SH, selaku Kepala Seksi Pegoperasian Prasarana, beliau menyatakan bahwa langkah-langkah dari rencana operasioanal dalam program sarana prasarana ini adalah pertama dengan

melakukan survey lapangan terlebih dahulu seperti apa, harus mengetahui kebutuhan masyarakat seperti apa, barulah masuk ketahap proses perencanaan dan harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ataupun harus sesuai dengan musrenbang, Lalu masuk pada tahap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setelah itu masuk lagi dalam tahap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sehingga dalam pelaksanaan programnya nanti di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dan dari sisi perencanaannya Dinas Perhubungan mempunyai Renstra per 5 tahun, disitu harus ada target, termasuklah disitu program sarana prasarana angkutan. Dan semua harus sesuai dengan rencana kerja operasionalnya, apabila tidak sesuai maka rencana kerjanya gagal. Dan yang terlibat didalamnya adalah Bappeda, dinas perhubungan, Satlantas, dan pihak-pihak yang terkait sesuai program yang akan dibikin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyusunan rencana kerja operasional dalam program pengadaan sarana prasarana angkutan umum harus melalui beberapa tahapan yaitu, pertama dengan melakukan survey, tujuannya survey ini adalah mengetahui permasalahan yang ada sehingga dalam penyusunan rencana kerjanya sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan, kedua barulah masuk ketahap perencanaan, ketiga masuk ketahap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), ke empat masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), lalu yang ke lima masuk ketahap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan terakhir adalah implementasinya.

4.2 Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan focus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang efektivitas perencanaan dalam pelaksanaan program pengadaan program sarana dan prasarana angkutan umum dikota Medan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis serta menyimpulkan terhadap permasalahan yang ingin dijawab. Berikut uraian hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

4.2.1 Adanya usaha untuk menganalisa situasi keadaan sebelum melakukan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum

Menurut Adisasmito (2009:27), menyatakan bahwa perencanaan merupakan salah satu komponen penting karena apabila gagal membuat perencanaan akan mengalami kendala dalam melakukan kegiatan selanjutnya. Fase perencanaan dari siklus perbaikan berkelanjutan membutuhkan perumusan perencanaan untuk memenuhi tujuan-tujuan dan sasaran kebijakan politik. Perencanaan lingkungan seharusnya memasukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi aspek-aspek lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan
- b. Persyaratan-persyaratan legal

- c. Kebijakan lingkungan dan kriteria kinerja internal
- d. Tujuan dan sasaran lingkungan
- e. Perencanaan dan program manajemen.

Langkah-langkah perencanaan menurut Herlambang (2013:47) adalah

- a. Analisa situasi
- b. Mengidentifikasi masalah dan prioritasnya
- c. Menentukan tujuan program
- d. Mengkaji hambatan dan kelemahan program
- e. Menyusun rencana kerja operasional

Berdasarkan asumsi dari teori diatas, penulis menilai bahwa analisa keadaan sebelum melakukan perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan sudah berjalan dengan baik, karena menurut penulis Dinas Perhubungan dalam membuat suatu proses perencanaan pengadaan sarana prasarana angkutan umum, yang pertama kali dilakukan Dinas Perhubungan adalah menganalisa suatu keadaan dengan cara menggunakan metode survey dan menerima laporan dari masyarakat agar mengetahui suatu keadaan sebelum melakukan proses perencanaan. Metode survey tersebut sudah lama dilakukan karena dianggap lebih efektif dan tepat sasaran dalam membuat suatu program.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 29 Maret 2021 dengan Bapak Burhanuddin P. Harahap, SH, yang menyatakan bahwa sebelum melakukan perencanaan pengadaan sarana

prasarana angkutan umum, hal yang pertama kali dilakukan oleh Dinas Perhubungan ialah dengan menyusun agenda terlebih dahulu seperti survey kondisi lapangan, kemudian masuk ke tahap proses perencanaan. Dari proses perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari masyarakat seperti usulan dari musrenbang, renstra, dan program dari Walikota.

4.2.2 Adanya upaya untuk mengidentifikasi masalah serta prioritas dalam melakukan suatu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum

Menurut Dharma (2003:41) perencanaan pada dasarnya merupakan proses penetapan tujuan dan sasaran serta penetapan cara pencapaian tujuan dan sasaran itu. Perencanaan harus mencakup kegiatan untuk menentukan apa yang akan dicapai (tujuan dan sasaran), mengapa harus dicapai (alasan), bagaimana mencapainya (cara, teknik, metode, dan prosedur), siapa yang akan melakukannya (orang, pembagian kerja), dimana melakukannya (tempat), dan kapan harus tercapainya (waktu).

Langkah-langkah perencanaan menurut Herlambang (2013:47) adalah:

- a. Analisa situasi
- b. Mengidentifikasi masalah
- c. Menentukan tujuan program
- d. Mengkaji hambatan dan kelemahan program
- e. Menyusun rencana kerja operasional

Berdasarkan asumsi teori tersebut penulis dapat menilai bahwa identifikasi masalah dalam melakukan perencanaan pengadaan sarana prasarana angkutan umum yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal, karena menurut analisis penulis Dinas Perhubungan memang sudah mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi mulai dari masih terdapatnya angkutan orang dan barang yang tidak layak beroperasi, angkutan barang yang melebihi muatan, sebagian halte rusak, masih terdapat ruas jalan yang rusak dan lain-lain. Semua dari permasalahan tersebut sudah dijadikan prioritas untuk dicari solusinya, akan tetapi Dinas Perhubungan masih belum melakukan kajian secara teknis terhadap permasalahan yang terjadi, hanya melakukan kajian dengan cara mendapatkan laporan dari masyarakat dan survey.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 01 April 2021 dengan Ibu Dra. Hj. Sukmawati, yang menyatakan bahwa permasalahan yang sudah teridentifikasi terhadap sarana prasarana angkutan orang saat ini adalah masih ada beberapa kondisi angkutan yang tidak layak beroperasi, beberapa ruas jalan yang rusak, dan sebagian halte rusak. Sedangkan permasalahan angkutan barang yang sudah teridentifikasi antara lain masih terdapatnya oknum-oknum yang membawa barang melebihi batas muatan angkutannya, dan sebagian angkutan barang yang kondisinya rusak. Dari permasalahan yang terjadi tersebut telah menjadi prioritas dari Dinas Perhubungan untuk dijadikan program sekaligus sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi, salah satu solusinya ialah dengan memperbaiki segala sarana

prasarana angkutan umum yang telah rusak seperti melakukan perbaikan armada-armada yang terbengkelai, halte, dan lain-lain.

4.2.3 Adanya tujuan dari program yang telah direncanakan serta mengkaji hambatan dan kelemahan dari program yang telah direncanakan

Menurut Sigit (2003:2) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Tangkilisang (2005:139) efektivitas adalah tingkat sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi (operasi kegiatan, program, atau misi) sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

Menurut Keban (2000:03) Perencanaan strategis memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu organisasi/badan dapat berjalan menuju tujuan, sesuai dengan misi dan visinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungannya.

Menurut Steiner (1997:07) Perencanaan strategis adalah proses pemelihan tujuan-tujuan organisasi penentuan strategis, kebijaksanaan dan program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijaksanaan telah di implementasikan.

Berdasarkan asumsi dari teori tersebut penulis menilai bahwa tujuan dari program pengadaan sarana prasarana angkutan umum sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, yang dimana pemerintah telah menyediakan bus yang nyaman dan murah, halte untuk tempat menunggu penumpang telah diperbaiki, dan untuk angkutan barang sendiri telah disediakan rambu-rambu khusus angkutan barang serta jumlah armada sudah ditambahkan, guna bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat serta mendukung segala mobilitas orang dan barang. Adapun hambatan dan kelemahan dari program sarana prasarana angkutan umum ini tidak ada karena program ini merupakan program yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat, akan tetapi kendala-kendala yang dialami Dinas Perhubungan ialah adanya pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat akibat dari pandemi Covid-19.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 29 Maret 2021 dengan Bapak Ami Kholis Hasibuan, S. SiT., MT, yang menyatakan bahwa, ada 2 macam versi angkutan umum yang pertama adalah angkutan orang yang dimana tujuan dari angkutan orang adalah untuk memberikan pelayanan pengangkut orang dengan baik dan menyediakan bus yang nyaman, bersih dan murah. Sedangkan yang kedua adalah angkutan barang yang dimana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pengiriman barang dengan aman.

Adapun kendala-kendala yang sering terjadi dari program sarana prasarana angkutan umum ini hanya seputar kendala teknis dilapangan yang dapat berubah-ubah dan Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa program sarana prasana angkutan ini tidak ada kelemahan melainkan sangat bermanfaat kepada masyarakat untuk melakukan mobilitas sehari-hari, tinggal halnya memikirkan bagaimana cara meningkatkan minat masyarakat kota Medan agar menaiki angkutan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah.

4.2.4 Adanya penyusunan rencana kerja operasional dalam perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum

Langkah-langkah perencanaan menurut Herlambang (2013:47), perlu dilakukan pada proses penyusunan sebuah perencanaan, yaitu:

- f. Analisa situasi
- g. Mengidentifikasi masalah dan prioritasnya
- h. Menentukan tujuan program
- i. Mengkaji hambatan dan kelemahan program
- j. Menyusun rencana kerja operasional

Ada dua tipe perencanaan menurut Herlambang (2013:47), sebagai berikut:

- c. Rencana-rencana strategi. Strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan organisasi dalam pencapaian misi. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan

organisasi, dan memberikan pemanfaatan sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan..

- d. Rencana-rencana operasional, dalam rencana operasional dibagi menjadi dua, yaitu :
 3. Rencana sekali pakai adalah serangkaian kegiatan terperinci yang kemungkinan tidak berulang dalam bentuk yang sama di waktu yang akan datang.
 4. Rencana tetap yaitu bentuk umum rencana tetap adalah kebijaksanaan, prosedur, dan aturan Rencana ini sekali ditetapkan akan terus diterapkan sampai perlu diubah atau dihapuskan

Menurut Sigit (2003:2) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Arikunto (1998:15) program merupakan kegiatan yang direncanakan, maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan.

Berdasarkan asumsi dari teori tersebut penulis berpendapat bahwa penyusunan rencana kerja operasional sudah berjalan dengan baik, karena dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narasumber, hal pertama dalam melakukan rencana kerja operasional dalam pengadaan sarana prasarana angkutan umum adalah dengan cara menganalisa kondisi lapangan serta mengidentifikasi masalah. Dari identifikasi masalah tersebut sudah diketahui permasalahan apa saja yang terjadi seperti masih terdapat armada-armada yang

sudah tidak layak untuk beroperasi, masih terdapat halte yang telah rusak, masih terdapat ruas jalan yang rusak, dan lain sebagainya, kemudian menentukan tujuan dari program pengadaan sarana prasarana angkutan umum yaitu untuk meningkatkan pelayanan angkutan orang dan barang, dan dari program pengadaan sarana prasarana angkutan umum ini tidak terdapat hambatan dan kelemahan melainkan memberikan manfaat terhadap masyarakat kota Medan.

Perencanaan program pengadaan sarana prasarana angkutan umum ini masuk kedalam kategori rencana tetap yang berarti sekali ditetapkan akan terus diterapkan, serta mengingat kota Medan merupakan salah satu kota yang penduduknya terpadat se-Indonesia sehingga memerlukan program pengadaan sarana prasarana angkutan umum.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 03 April 2021 dengan Bapak Gumartin Tampubolon, SH, yang menyatakan bahwa, langkah-langkah rencana kerja operasional pengadaan sarana prasarana angkutan umum yang pertama kali dilakukan adalah survey, yang dimana survey ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dilapangan, setelah diketahui permasalahan yang terjadi baru masuklah dalam tahap perencanaan, yang dimana isi perencanaan ini harus sesuai dengan permintaan masyarakat serta harus sesuai dengan musrenbang yang telah dilakukan.

Kemudian barulah masuk ketahap Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), baru masuk pada tahapan Rencana kerja dan anggaran (RKA), sehingga dalam pelaksanaan program sarana prasarana angkutan umumnya nanti masuk

dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), barulah bisa program sarana prasarana angkutan umum diimplementasikan dan seluruh program harus sesuai dengan rencana kerja operasional, bila tidak sesuai maka gagallah program tersebut dilaksanakan. Dan perlu diketahui program pengadaan sarana prasarana angkutan umum ini akan terus ditetapkan sampai masa berlakunya.

Perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum dalam mewujudkan kota Medan metropolitan merupakan program untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta mendukung segala mobilitas masyarakat. Analisa situasi sebelum melakukan perencanaan pengadaan sarana prasarana angkutan umum yang dilakukan Dinas Perhubungan sudah berjalan dengan efektif, hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan memakai metode survey dan menerima laporan dari masyarakat yang sangat efektif sebelum melakukan perencanaan. Hal ini terbukti dalam pengadaan halte baru yang dibangun sekitaran dijalan marelan yang dimana diawali dengan survey lokasi agar mengetahui kondisi halte yang rusak agar dilakukan pembangunan kembali terhadap halte yang rusak tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Herlambang (2013:47) yang menjelaskan bahwa dalam penyusunan suatu perencanaan yang harus dilakukan pertama kali adalah menganalisa situasi keadaan, yang dimana bisa menggunakan metode survey, sample, atau sejenisnya untuk mengetahui kondisi wilayah tertentu.

Selanjutnya dari segi mengidentifikasi masalah dalam melakukan suatu perencanaan pengadaan sarana prasarana angkutan umum sudah berjalan dengan efektif, karena sudah diketahui permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti masih terdapat ruas jalan yang rusak, halte yang terbengkalai, dan lain sebagainya. Akan tetapi masih ada kendala-kendala yang terjadi seperti masih belum melakukan kajian secara teknis sehingga permasalahan yang sudah terjadi akan terulang kembali, seperti permasalahan halte yang selalu rusak akibat dari pencurian besi-besi halte oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Kemudian dari aspek tujuan program yang telah direncanakan sudah berjalan dengan efektif, hal ini dapat dilihat dari peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dengan telah disediakannya angkutan orang yang nyaman dan aman seperti bus Trans Metro Deli, bus Mebidang, bus Damri, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mendukung mobilitas masyarakat kota Medan. Akan tetapi masih terdapat kendala-kendala yang terjadi seperti minat masyarakat kota Medan untuk menaikki bus yang sudah disediakan pemerintah masih tergolong kurang karena masyarakat kota Medan masih nyaman dengan kendaraan pribadi untuk berpergian.

Selanjutnya penyusunan rencana kerja operasional dalam pengadaan sarana prasarana angkutan umum sudah berjalan dengan efektif, akan tetapi masih terdapat kendala-kendala yang terjadi salah satunya adalah ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan standar kerja operasional yang sudah diterapkan. Walaupun begitu masih bisa diatasi dengan menambah standar-standar yang lainnya yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Analisa keadaan sebelum melakukan perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik. Karena sebelum melakukan perencanaan, hal yang pertama kali dilakukan ialah survey lapangan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi suatu wilayah agar sebuah perencanaan yang dilakukan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan serta dianggap sebagai metode yang sangat tepat dan efisien dalam membuat suatu program.
2. Identifikasi masalah yang dilakukan pemerintah dalam melakukan suatu perencanaan pengadaan sarana prasarana angkutan umum masih belum berjalan dengan optimal. Karena pemerintah masih belum melakukan kajian-kajian secara teknis perihal permasalahan yang terjadi sehingga permasalahan yang terjadi akan terus terulang kembali, seperti masih terdapatnya halte yang rusak, ruas jalan yang rusak, dan lain-lain.
3. Tujuan program pengadaan sarana prasarana angkutan umum sudah tercapai sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, yang disebutkan salah satunya adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah menjamin ketersediaan angkutan massal orang dengan kendaraan bermotor umum dikawasan perkotaan. Hal ini dapat dilihat dengan pemerintah kota Medan sudah menyediakan bus yang nyaman dan aman seperti bus Trans Metro Deli, bus Mebidang, serta halte yang dulunya rusak sekarang sudah diperbaiki lagi bahkan dibangun kembali guna untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

4. Penyusunan rencana kerja operasional dalam perencanaan program pengadaan sarana prasarana angkutan umum sudah berjalan dengan baik. Penyusunan rencana kerja operasional pengadaan sarana prasarana angkutan umum ini masuk kedalam kategori rencana tetap yang berarti program yang akan terus ditetapkan karena mengingat kota Medan merupakan salah satu kota yang penduduknya terpadat Se-indonesia sehingga memerlukan program tersebut.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran terhadap Efektivitas Perencanaan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum Dalam Mewujudkan Kota Medan Metropolitan.

1. Pemerintah diharapkan agar segera melakukan peremajaan atau perbaikan terhadap sarana prasarana angkutan umum yang telah rusak.

2. Permasalahan-permasalahan yang telah ditemukan yang berkaitan dengan sarana prasarana angkutan umum mungkin belum semuanya teridentifikasi atau diketahui oleh Dinas Perhubungan. Sehingga diharapkan agar dibuat kajian-kajian secara teknis perihal permasalahan tersebut dan memberi perhatian lebih terhadap sarana prasarana angkutan umum demi terciptanya kota Medan menjadi kota lebih baik lagi.
3. Harus ada pengawasan yang lebih optimal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga keberadaan sarana prasarana angkutan umum dikota Medan.
4. Pemerintah sebaiknya menjalin kerja sama kepada masyarakat agar perencanaan program pengadaan sarana prasarana angkutan umum yang akan diterapkan berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala,
5. Pemerintah seharusnya memberikan sanksi yang berat terhadap oknum yang merusak sarana prasarana angkutan umum yang telah disediakan oleh pemerintah agar mendapatkan hukuman sehingga tidak terjadi lagi perusakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmitho, Wiku. 2009. "*Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit*".
Jakarta: Rajawali Pers

Allen, Louis A. 1961. "*Karya Manajemen*". Jakarta: Pembangunan Gahlia
Indonesia

A.S Moenir. 1992. "*Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*", Jakarta:
Bumi Aksara

Aditama, Tjandra Yoga, 2017. "*Manajemen Administrasi Rumah Sakit*".
Jakarta: Rajawali Pers

Azwar, Rihna Azrul, 1998, "*Pengantar Administrasi Kesehatan*", Jakarta:
Grafiti Medika Pers

Dharma, Agus. 2003. "*Manajemen Supervisi*". Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada

Bastie, Jean.,Dezert, Bernard. 1991. "*La Ville*". French: Masson.

Gie, The Liang. 2007. "*Administrasi Perkantoran Modern*". Yogyakarta :
Liberty

Handoko, T. hani, 2003. "*Manajemen*". Yogyakarta: BPFE-
YOGYAKARTA

- Herlambang, Susatyo. 2013. **“Pengantar Manajemen”**. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Ibrahim Bafadal, 2003. **“Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya”**, Jakarta: Bumi Aksara
- Jones, Charles O. 1996. **“Pengantar Kebijakan Publik”**. Jakarta: Pt Raja Grafindo
- Lukas Dwiantara, dan Rumsari Hadi Sumarto. 2004. **“Manajemen Logistik”**. Jakarta: PT raja grafindo persada
- Mathis.L.Robert dan Jackson.H.John. 2001, **“Manajemen Sumber Daya Manusia”**, Jakarta : Buku kedua.
- Moleong, Lexy J. 2006. **“Metodologi Penelitian Kualitatif”**. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pekei, Beni. 2016. **Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi**, Jakarta, Taushia
- Siagian, Sondang, P. 2002. **“Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Cetakan Pertama”**, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Soehardi, Sigit. 2003. **“Perilaku Organisasi”**. Yogyakarta: BPFE UST.
- Sugiyono. 2010. **“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”**. Bandung: Alfabeta
- Steiner,dkk.1997. **“Management Policy and Strategy”**, New York: Macmillan

Suharsimi Arikunto. 1998. "*Penilaian Program Pendidikan*", Jakarta: PT Bina Aksara

Tangkiliasang, hesel nogi. 2005. "*Manajemen public*". Jakarta, PT Grasindo

Warpani, Suwardjoko. 1990. "*Merencanakan Sistem Perangkutan*". Bandung: Penerbit ITB

Sumber lain

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa

Rencana Strategi Bappeda Kota Medan Tahun 2011-2015

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan

Skripsi

Mutia Putri, Indah. 2019. "*Efektivitas Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*". Medan: UMSU

Pratama Putra, Rizky. 2019. ***Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Penyediaan Halte Sebagai Fasilitas Umum di Kota Medan***. Medan:
UMSU

RIWAYAT HIDUP

Nama : Irgi Ahmad Fahrezi
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 23 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jln. Patimura No. 28 B
Anak ke : 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Samsul Rizal Guci
Ibu : Nurhayati Piliang
Alamat Orang Tua : Jln. Patimura No. 28 B

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SDN Madrasah Ibtidaiyah Gunungsitoli
2. Tamat dari SMPN 04 Gunungsitoli
3. Tamat dari SMAN 01 Gunungsitoli
4. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Penulis

Irgi Ahmad Fahrezi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Medan, 16 Februari2021

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Nalil Khairiah., S.IP., M.Pd
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Irgi Ahmad Fahrezi
N P M : 1703100014
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 131.0 sks, IP Kumulatif 3.55

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Efektivitas Perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum dalam mewujudkan kota medan metropolitan	✓
2	Kinerja dinas Perhubungan dalam memberikan Pelayanan transportasi bagi penyandang disabilitas di kota medan	
3	Strategi pengembangan UMKM dalam meningkatkan pendapatan UMKM di kota medan	

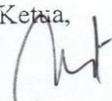
Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 16 Februari2021

Ketua,

(.....)

Pemohon,



(Irgi Ahmad Fahrezi.....)

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.

042



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING

Nomor : 207/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **16 Pebruari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **IRGI AHMAD FAHREZI**
N P M : 1703100014
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PERENCANAAN PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN KOTA MEDAN METROPOLITAN**

Pembimbing : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 042.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 16 Pebruari 2022.



Ditetapkan di Medan,

Medan, 06 Rajab 1442 H
18 Februari 2021 M



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 24 Februari 2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : IRGI AHMAD FAHREZI
N P M : 1703100014
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 0.42./SK/IL.3/UMSU-03/F/2021. tanggal 16 Februari 2021 dengan judul sebagai berikut :

EFEKTIVITAS PERENCANAAN PROGRAM PENGADAAN
SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN UMUM DALAM MEMUJUDKAN
KOTA MEDAN METROPOLITAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprosals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Ananda M. G. Hardika, S. Sos., M. S. P)

Pemohon,

(IRGI Ahmad Fahrezi.....)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 377/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : -.-
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 04 Syaban 1442 H
18 Maret 2021 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **IRGI AHMAD FAHREZI**
N P M : 1703100014
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PERENCANAAN PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN KOTA MEDAN METROPOLITAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

PEDOMAN WAWANCARA

#cc Kaset
16/3 2021
Ananda Mahardika

- Judul Penelitian Skripsi : Efektivitas Perencanaan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum dalam Mewujudkan Kota Medan Metropolitan.
- Nama Peneliti : Irgi Ahmad Fahrezi
- NPM : 1703100014
- Prodi/Fakultas : Ilmu Administrasi Publik/ Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Materi Penelitian : Pelaksanaan kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- Kategorisasi Penelitian : 1. Adanya usaha untuk menganalisa situasi keadaan sebelum melakukan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum.
2. Adanya upaya untuk mengidentifikasi masalah serta prioritas dalam melakukan suatu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum.
3. Adanya tujuan dari program yang telah direncanakan serta mengkaji hambatan dan kelemahan dari program yang telah direncanakan.
4. Adanya penyusunan rencana kerja operasional dalam perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum.

Pertanyaan wawancara berdasarkan Kategorisasi Penelitian

1. Adanya usaha untuk menganalisa situasi keadaan sebelum melakukan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum:
 - a. Bagaimana cara menganalisa situasi dan keadaan dalam perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum di kota medan?
 - b. Apa saja yang dilakukan dalam menganalisa situasi dalam perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum di kota medan?
 - c. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum di kota medan?
 - d. Apa saja kendala-kendala yang di alami Dinas Perhubungan dalam perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum di kota medan?

2. Adanya upaya untuk mengidentifikasi masalah serta prioritas dalam melakukan suatu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum.
 - a. Apa saja permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi dalam perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum di kota medan?
 - b. Apa saja permasalahan yang menjadi prioritas Dinas Perhubungan dalam perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum dikota medan?
 - c. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah menjadi prioritas untuk dijadikan sebagai solusi dalam perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum dikota medan?
 - d. Apakah ada kendala untuk menetapkan solusi dari permasalahan yang telah menjadi prioritas Dinas Perhubungan?

3. Adanya tujuan dari program yang telah direncanakan serta mengkaji hambatan dan kelemahan dari program yang telah direncanakan.
 - a. Apa saja tujuan dari program yang telah direncanakan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana angkutan umum di kota medan?
 - b. Apa saja kendala atau hambatan dari progam pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum dikota medan?
 - c. Apa saja kelemahan-kelemahan dari program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum dikota medan?
 - d. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dan kelemahan dari program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum dikota medan?

4. Adanya penyusunan rencana kerja operasional dalam perencanaan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum.
 - a. Apa saja langkah-langkah dari rencana kerja operasional dalam program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum dikota medan?
 - b. Apakah dari rencana kerja operasional sudah sesuai dengan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum dikota medan?
 - c. Siapa saja yang terlibat dari rencana kerja operasional dalam program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum dikota medan?
 - d. Apakah ada kordinasi atau kerja sama dari pihak lain untuk menjalan rencana kerja operasional yang berkaitan dengan program pengadaan sarana dan prasarana angkutan umum dikota medan?



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI KKN/MAGANG/PKL

NOMOR : 070/968/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor: 1625/II.3-AU/UMSU/F/2020 Tanggal: 03 Agustus 2020 Hal: Izin Pelaksanaan KKN.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi KKN/Magang/PKL untuk melaksanakan KKN kepada :

Nama : Irgi Ahmad Fahrezi.
NPM : 1703100014.
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota.
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan KKN/Magang/PKL terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi KKN/Magang/PKL.
3. Tidak dibenarkan melakukan KKN/Magang/PKL atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Surat rekomendasi KKN/Magang/PKL dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
5. Surat rekomendasi KKN/Magang/PKL ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.

Pada Tanggal : 29 Agustus 2020

Dr. Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,



Dr. SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMBINA Tk. I
NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Lurah Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota.
3. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- ④ Yang Bersangkutan.
5. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris No.114-A Medan Kode Pos 20127
Telp. (061) 8450542

Medan, 09 April 2021

Nomor : 070/1184/DISHUB/IV/2021
Lamp. : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -

Medan

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070/2122/Balitbang/2021 Tanggal 25 Maret 2021 Perihal : Surat Rekomendasi Penelitian A.n Irgi Ahmad Fahrezi ; NPM : 1703100014 ; Judul Penelitian : Efektivitas Perencanaan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum Dalam Mewujudkan Kota Medan Metropolitan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN



IMELDA HERLINA, SH.MSi
PEMBINA
NIP. 19710312 199803 2 003



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 775/JUND/11.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 09 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU



SK-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	NELLI NURMALA SARI ✓	1703100011	NALLI KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENYALURKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA MAMAS BARU KABUPATEN ACEH TENGGARA
7	LIHAM RAMADHAN ✓	1603100056	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALLI KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	FUNGSI PERENCANAAN PARTISIPASI DALAM EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BINJAI
8	REGI AHMAD FAHREZI ✓	1703100014	NALLI KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	EFEKTIVITAS PERENCANAAN PROGRAM PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN KOTA MEDAN METROPOLITAN
9						
10						

Menulis Sidang :

Ditandatangani oleh :


 Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum
 Wakil Rektor

Ketua,
 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 26 Dzulhaidah 1442 H
07 Juli 2021 M

Panitia Ujian
 Sekretaris

 Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom